



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/s/xi/2014*

**Alasan *Inaction* Amerika Serikat Di Sengketa Laut Cina  
Selatan Tahun 2008-2016**

Skripsi

Oleh  
Nabila Putri Tamariyani  
2013330130

Bandung

2018



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/s/xi/2014*

**Alasan *Inaction* Amerika Serikat Di Sengketa Laut Cina  
Selatan Tahun 2008-2016**

Skripsi

Oleh  
Nabila Putri Tamariyani  
2013330130

Pembimbing  
Giandi Kartasmita S.IP., M.A

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Nabila Putri Tamariyani  
Nomor Pokok : 2013330130  
Judul : Alasan *Inaction* Amerika Serikat Di Sengketa Laut Cina Selatan  
Tahun 2008-2016

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Selasa, 9 Januari 2018  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**  
Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

: 

**Sekretaris**

Giandi Kartasmita, S.IP., M.A.

: 

**Anggota**

Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

: 

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## PERNYATAAN



Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nabila Putri Tamariyani  
NPM : 2013330130  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : Alasan *Inaction* Amerika Serikat Di Sengketa Laut  
Cina  
Selatan Tahun 2008-2016

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar

Bandung, 1 Januari 2018



Nabila Putri Tamariyani

## ABSTRAK

Nama : Nabila Putri Tamariyani  
NPM : 2013330130  
Judul : Alasan *Inaction* Amerika Serikat Di Sengketa Laut Cina Selatan  
Tahun 2008-2016

---

Laut Cina Selatan sudah menjadi sebuah fokus global sejak lama dan semakin meningkat setelah Cina mulai menempatkan klaim sepihaknya tanpa dasar hukum yang jelas di wilayah tersebut. Bagi Amerika Serikat sebagai negara superpower, melakukan kebijakan dan tindakan di daerah tersebut sama pentingnya dengan menjaga jalur laut tetap terbuka dengan menghormati perjanjian dan hukum internasional, terutama UNCLOS. Melalui kepentingan nasionalnya, Amerika Serikat berusaha untuk meraih tujuan negara berupa kestabilan keamanan global dengan menggunakan kekuatannya di sistem internasional. Penggolongan agenda dan tujuan untuk mendapatkan suara kepercayaan negara di seluruh dunia menjadi alasan utama *inaction* Amerika Serikat di wilayah sengketa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah Amerika Serikat melakukan *inaction* dan alasannya melalui penggolongan prioritas kepentingan nasional selama proses pengambilan kebijakan. Penulis menggunakan teori Neo-Realisme yang menekankan bahwa *power of balance* mampu mempengaruhi politik luar negeri sebuah negara dan memiliki keterkaitan dengan *interest* yang dimilikinya. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi dokumentasi dari buku, jurnal, laporan, dan halaman internet. Penelitian ini akan menunjukkan bahwa pemilihan *inaction* oleh Amerika Serikat dipengaruhi tidak hanya dari faktor internal melainkan juga eksternal, yaitu sikap Amerika Serikat selama proses pencapaian dan pemenuhan kepentingan, yang kemudian mempengaruhi pengambilan keputusan atas bagaimana negara bertindak terhadap sengketa Laut Cina Selatan.

Kata kunci: *inaction*, laut cina selatan, alasan, *power of balance*, kepentingan nasional, politik luar negeri, Cina, Amerika Serikat, Neo-Realisme

**ABSTRACT**

*Name* : Nabila Putri Tamariyani  
*NPM* : 2013330130  
*Title* : *US Inaction Towards South China Sea Dispute in 2008-2016*

---

*The South China Sea has been a global focus for a long time and has been increasing after China began to lay its unilateral claim unconditionally without legal basis in the region. For United States as a superpower, its policy and action in the area is as important as keeping the sea lanes open by respecting international treaties and laws, especially UNCLOS. Through its national interest, the United States of America seeks to achieve the state's goal of global security stability by using its strengths and power in international system. The priority categorization of the nation's agenda and purpose is the key to win the trust from the countries around the world by not doing significant action, is the main reason for the United States inaction in the disputed territory.*

*This research aims to analyze the reasons of the United States' inaction and the reason through the priority classification of its national interest during the policy-making process using Neo-Realism theory which emphasizes that power of balance which has the power to influence a country's foreign policy and the relevance of its interest. The researcher uses qualitative method and documentation study technique from books, journals, reports, and websites, and at the end of this research will show that the selection of inaction by the United States of America were affected not only by the internal factors but also the external, regarding the states approach during the process of achieving and fulfilling its bigger interest, which then influences the decision-making on how the state behave towards the South China Sea dispute.*

*Keywords:* *inaction, south china sea, reason, power of balance, national interest, foreign policy, China, United States, Neo-Realism*

## KATA PENGANTAR

Puji Dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan perkenanannya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul: **Alasan *Inaction* Amerika Serikat Di Sengketa Laut Cina Selatan Tahun 2008-2016**. Penulisan ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian akhir jenjang Sarjana Program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan.

Permasalahan perubahan yang tidak signifikan atau *inaction* Amerika Serikat terkait sengketa di Laut Cina Selatan, menjadi fokus dalam penelitian ini. Terbentuknya kepentingan nasional dengan penggolongannya dapat dikaitkan dengan prioritas negara dan alasan serta tujuan sebenarnya maupun pengertian intersubjektif antara Cina dan Amerika Serikat dalam mempertahankan *superpower* masing-masing.

Penulis menyadari penulisan ini masih jauh dari sempurna karena masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh sebab itu dengan sangat terbuka penulis mengharapkan kritik dan saran berbagai pihak untuk memperbaiki dan melengkapi penelitian ini di masa yang akan datang.

Bandung, 1 Januari 2018

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya dan dengan menyampaikan salam serta shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu dalam menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar S.IP. di Universitas Katolik Parahyangan. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan doa dari berbagai pihak selama masa studi hingga penyusunan. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Ayah Tommy Singgih, Mamah Andriyani, dan Ade Nadhifa Tamariyani serta Mamih Ike Sunandar yang sudah memberikan dukungan, doa, dan pelajaran hidup dalam segala bentuk tanpa lelah. Semoga dengan gelar sarjana ini, teteh bisa membanggakan keluarga. Teruntuk ade yang sangat sabar dalam menghadapi teteh yang bawel, jangan pernah berhenti untuk berjuang dan mempertahankan prinsip. Tum ayah, mamah, dan adenyanya.  
*I love you guys so much!*
- Mas Giandi Kartasasmita sebagai pembimbing yang sudah sabar dan tanpa henti membantu saya dalam penulisan skripsi walaupun saya banyak nanya, waktu diskusi dan bertukar pikiran yang telah memberikan pencerahan dalam penulisan skripsi ini. Mas Idil Syawfi dan Mas Adri Harsawaskita sebagai dosen penguji yang membuat situasi sidang menjadi tidak menegangkan sehingga membentuk diskusi yang menyenangkan.

- Keluarga besar Singgih (Bude Hanny, Bude Pia, Pakde Dodo, Pakde Djur, Mas Adhim, Mas Ardhia, dan Mba Avi) dan keluarga besar Sunandar (Uwa Rita, Uwa Tommy, Uwa Cece, Uwa Fauzi, Uwa Dede, Uwa Dadang, Teteh Ratih, Teteh Ody, Teteh Nova, Mas Dito, dan Ade Nadya) yang sudah sabar dan menerima segala kekonyolan dan humor-humor garing ila tanpa berhenti mendoakan kesuksesan serta kelancaran dalam segala bentuk.
- Tsamara Fahrana, *my best friend since high school, you are the person who make me realize there are a lot of 'things' going on in this crazy world, the person who stood up for me when no one else does, the only person who would never judge me, and MY PARTNER IN LITERALLY EVERY CRIME! Thankyou for helping me though everything, Love you Ts.*
- Abigail Bernadette, Diah Kristiningsih, dan Galuh Maharani, teman terdekat yang dipertemukan *in a very unfortunate condition*. Terima kasih sudah bersabar dengan selera humor gue yang ga bisa kalian *keep up* dan segala bantuan serta petunjuk 'kebahagian' di hari-hari terburuk dan terbaik. *Lots of loves girls!*
- Ijul Budiprakoso, Omar Abdul Majid, dan Ari Wardhana, teman terdekat yang menemani dikala segala kondisi dan menertawakan jika hal buruk menimpa gue, *but I always feel like we will always be there for each other*. Game-game kalian yang telah membuat hari-hari di UNPAR terasa lebih ringan dan pastinya, asupan *boys' life point of view*. *Lots of loves guys!*

- Vania Subrata dan Garcia Rahsti, *I don't know what to say really*, kalo gaada kegilaan dan kata-kata kasar kalian di hidup gue pas kuliah, sepertinya akan sangat disayangkan. *Shout it out loud to the world please! (I'm dead serious)*
- Syahreza, Kunciung Giarenza, Carol Marshaulina, Izhar Isra, Jason "Jarpul" Januar, dan teman-teman lainnya yang sudah memberikan asupan kopi, curhatan, emosi, dan segala makanan sehari-hari saat skripsi. Kalian adalah orang-orang yang tidak kenal lelah dalam melewati segala tantangan hidup. *Thankyou for keeping me on the track (sometimes).*
- Dosen-dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, yang sangat memotivasi hidup, *sharing* ilmu, dan membantu saya dalam perkuliahan. Teruntuk yang spesial, Mba Nophie sebagai dosen pemberi keterbukaan pandangan dalam hidup hanya dalam satu mata kuliah dan teman curhat yang tidak pernah lelah saya *invade* ruangnya. *Words can't express how I actually really adore you as a woman.*
- Ka Icha, Vici, Lintang, Kirei, Ka Rani, dan teman-teman Kosan C103 yang sudah sabar mendengarkan musik dan kebrisikan minta asupan selama 4,5 tahun. *I know you girls will miss me so much yes?!*
- *To my D.C. friends*, Wifianni Wilanisa, Eka Putra, and Iyung Yungke, *thankyou for everything, you guys are irreplaceable.*
- Semua pihak yang tidak disebutkan dan ikut membantu, mendukung, serta mendoakan secara langsung atau tidak langsung, *I thanked you guys really*, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Yang Maha Kuasa.

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR GRAFIK .....	ix
DAFTAR SINGKATAN .....	x
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b> .....	<b>12</b>
1.1.   Latar Belakang Masalah .....	12
1.2.   Identifikasi Masalah .....	21
1.2.1.   Deskripsi Masalah .....	21
1.2.2.   Pembatasan Masalah .....	25
1.2.3.   Perumusan Masalah .....	26
1.3.   Tujuan dan Manfaat .....	26
1.3.1.   Tujuan Penelitian .....	26
1.3.2.   Kegunaan Penelitian .....	26
1.4.   Kajian Literatur .....	27
1.5.   Kerangka Pemikiran .....	33
1.6.   Metode dan Teknik Pengumpulan Data .....	41
1.6.1.   Metode Penelitian .....	41
1.6.2.   Teknik Pengumpulan Data .....	41
1.7.   Sistematika Pembahasan .....	42
<b>BAB II     EKSPANSI CINA DI LAUT CINA SELATAN</b> .....	<b>44</b>
2.1.   Laut Cina Selatan dan Sejarah Klaim Cina .....	45
2.2.   Klaim <i>Nine-dash Line</i> oleh Cina .....	55
2.3.   Ekspansi Cina Dalam Pandangan UNCLOS .....	59
2.3.1.   Pelanggaran Batas Wilayah Laut oleh Cina .....	63
2.3.1.1.   Kasus People Republic of China melawan Malaysia dan Vietnam ....	63
2.3.1.2.   Kasus People Republic of China melawan Filipina .....	66

BAB III	KEPENTINGAN NASIONAL AMERIKA SERIKAT DI SENGGKETA LAUT CINA SELATAN .....	69
3.1.	Keterkaitan <i>Inaction</i> dengan Kepentingan Nasional Amerika Serikat .....	70
3.1.1.	Penggolongan Kepentingan Nasional Amerika Serikat .....	71
3.1.2.	<i>Areas of US Disinterest</i> .....	81
3.1.3.	Kepentingan Nasional Amerika Serikat di Laut Cina Selatan .....	83
3.1.3.1.	Peaceful Resolution of Disputes .....	83
3.1.3.2.	Freedom of Navigation .....	84
3.1.3.3.	International Law .....	87
3.2.	Perkembangan Kebijakan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan .....	89
3.3.	<i>Action</i> di Sengketa Laut Cina Selatan .....	92
3.3.1.	Ekspektasi Negara Aliansi terhadap Amerika Serikat .....	92
3.3.2.	<i>Action</i> Amerika Serikat terhadap Sengketa Laut Cina Selatan .....	97
3.4.	Sengketa Laut Cina Selatan (bukan) sebagai <i>Flashpoint</i> .....	102
3.5.	Peran Negara <i>Superpower</i> di Sengketa Laut Cina Selatan .....	105
3.5.1.	Peran Amerika Serikat <i>Global Superpower</i> .....	105
3.5.2.	Peran Cina Sebagai <i>Regional Superpower</i> .....	110
BAB IV	ALASAN DIPILIHNYA <i>INACTION</i> OLEH AMERIKA SERIKAT DI SENGGKETA LAUT CINA SELATAN .....	113
4.1.	Mengapa AS <i>Rebalance</i> Asia dan Tidak <i>Overpower</i> Cina? .....	113
4.2.	Faktor Pendukung <i>Inaction</i> oleh Amerika Serikat .....	122
4.3.	Tujuan dan Alasan <i>Inaction</i> .....	130
BAB V	KESIMPULAN .....	140

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Laut Cina Selatan .....	15
Gambar 1.2	Peta Wilayah Sengketa Laut Cina Selatan .....	17
Gambar 3.1	Upaya Pengembangan Kapasitas Militer oleh <i>Department of Defense</i> Amerika Serikat di Asia tenggara .....	102

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Penggolongan <i>National Interest</i> Amerika Serikat Tahun 2010.....	74
Tabel 3.2 Kepentingan Strategi Nasional Amerika Serikat Tahun Fiskal 2010-2017.....	79

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 4.1 Anggaran Militer <i>Department of Defense</i> Amerika Serikat Tahun Fiskal 2010-2017.....	126
--	-----

**DAFTAR SINGKATAN**

AS	: Amerika Serikat
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nation
CLCS	: Commision on the Limits of Continental Shelf
CoC	: Code of Conduct
DoC	: Declaration of Conduct
DoD	: Department of Defense
EDCA	: Enhanced Defense Cooperation Agreement
FONOP	: Freedom of Navigation Operation
FTA	: Freight Transport Association
IMF	: International Monetary Fund
ISIL	: Islamic State of Iraq and the Levant
ISR	: Interrupt Service Routine
ITLOS	: Internatinal Tribunal for the Law of the Sea
NEA	: Naval Engagement Activity
NM	: Nautical Miles
OCO	: Overseas Contingency Operation
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa

PDI	: Perang Dunia I
PDII	: Perang Dunia II
PLA	: People Liberation Army
ROC	: The Republic of China
PRC	: People Republic of China
SCS	: South China Sea
SEASURVEX	: Sea Surveillance Area
SMASHEX	: Simulated Submarine Casualty Exercise
THAAD	: Terminal High Altitude Area Defense
TPP	: Trans-Pacific Partnership
UN	: United Nations
UNCLOS	: United Nation Convention on the Law of the Sea
WMD	: Weapon of Mass Destruction
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Konflik Laut Cina Selatan (*South China Sea*) adalah salah satu isu global yang sudah lama menjadi perbincangan para aktor internasional, hal tersebut disebabkan karena wilayah tersebut merupakan pintu gerbang komersial dan ekonomi penting bagi sebagian besar pengiriman perdagangan dunia. Sebagai sub-kawasan dari Indo-Pasifik, daerah Laut Cina Selatan termasuk dari wilayah strategis untuk banyak negara di sekitarnya, tidak terkecuali berbagai negara yang jauh letak geografisnya dari konflik, yang sebenarnya bukan aktor yang langsung terkait dengan persengketaan wilayah tersebut, tetapi tetap terpengaruh.

Laut Cina Selatan merupakan lokasi dari beberapa sengketa teritorial kompleks yang menjadi penyebab konflik dan ketegangan di seluruh indo-Pasifik. Melihat kelebihan yang dimiliki oleh wilayah ini, tidak dapat dipungkiri bahwa negara-negara di dunia rela mengeluarkan berbagai kebijakan yang bersifat defensif maupun ofensif untuk mempertahankan kekuasaan atas wilayah-wilayah yang termasuk dalam klaim teritorinya.

Secara geografis, Laut Cina Selatan adalah laut semi tertutup yang berbatasan dengan Brunei Darussalam, Kamboja, Cina, Indonesia, Malaysia, Filipina,

Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam,<sup>1</sup> dengan lebar sekitar 550-650 *nautical miles* (nm) dengan panjang lebih dari 1200nm.<sup>2</sup> Di bagian barat Samudera Pasifik, antara benua Asia dan Oceania, sedangkan di bagian utara, berbatasan dengan Taiwan, Guangdong, dan Guangxi, Cina. Batas ini membentang ke arah timur Pulau Palawan Filipina, ke arah barat ujung Indo-Cina dan ujung Malaysia. Pada daerah selatan, memiliki perbatasan daerah perbukitan antara Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan yang terhubung dengan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia melalui Selat Bashi, Laut Sulu, dan Selat Malaka.<sup>3</sup> Wilayah ini juga terletak di jalur pelayaran internasional antara Samudera Hindia dan timur laut Asia, termasuk pelabuhan Cina, Jepang, Korea, dan Rusia.<sup>4</sup>

Laut Cina Selatan memiliki peran penting dalam geopolitik Indo-Pasifik. Pertumbuhan ekonomi berbagai negara di sekitarnya sangat bergantung pada daerah tersebut, terutama untuk perdagangan, pelayaran komersial, ekspor, impor, distribusi bahan bakar dan bahan baku terutama untuk Jepang dan Korea Selatan. Di dalam daerahnya, memiliki formasi pulau dan karang besar, yaitu Kepulauan Spratly terdiri dari lebih dari 140 pulau, batu karang, dan kekayaan alam lainnya yang tersebar di area seluas lebih dari 410.000 kilometer persegi (km<sup>2</sup>), Kepulauan

---

<sup>1</sup> Euan Graham, "South China Sea" The Loewy Institute, April 29, 2016, <https://www.loewyinstitute.org/issues/south-china-sea>

<sup>2</sup> Robert Beckman, "The American Journal of International Law," *The UN Convention on Law of the Sea and The Maritime Dispute of the South China Sea* 107, no. 1 (2013), 143, <http://search.proquest.com/docview/1346762258/D8E44EC4F5264E18PQ/15?accountid=31495>

<sup>3</sup> Derek Watkins, "Territorial Disputes in The Waters Near China," *The New York Times*, 8 Mei, 2014, [https://www.nytimes.com/interactive/2014/02/25/world/asia/claims-south-china-sea.html?\\_r=1](https://www.nytimes.com/interactive/2014/02/25/world/asia/claims-south-china-sea.html?_r=1)

<sup>4</sup> Robert Beckman, *The American Journal of International Law*, "The UN Convention on Law of the Sea and The Maritime Dispute of the South China Sea" 107, no. 1 (2013), 143, <http://search.proquest.com/docview/1346762258/D8E44EC4F5264E18PQ/15?accountid=31495>

Paracel yang terletak di sudut timur laut dari Laut Cina Selatan, terdiri dari sekitar 35 pulau dan terumbu karang dengan luas sekitar 15.000km<sup>2</sup> permukaan laut. Pulau Woody sebagai pulau terbesar di Kepulauan Paracel dengan luas yang hampir sama dengan total luas dari tiga belas kali pulau terbesar di Kepulauan Spratly yang terletak di Kota Sansha. Kepulauan Natuna dan Karang Scarborough terletak kira-kira sekitar 24nm dari Provinsi Zambales di Filipina merupakan laguna terbesar seluas 150km<sup>2</sup> yang dikelilingi oleh karang.<sup>5</sup> Perebutan dalam sengketa maritim dan kawasan terjadi karena wilayah tersebut mengandung kekayaan lahan perikanan yang tidak diatur batas-batasnya sehingga mudah dieksploitasi, serta penelitian yang melaporkan bahwa daerah dalam kawasan tersebut memiliki cadangan minyak dan gas yang belum ditemukan.<sup>6</sup>

Revolusi industri di Asia merupakan dasar dari kebutuhan sumber daya dan menjadi penguat terjadinya klaim di Laut Cina Selatan. Menurut Bank Dunia, terbukti memiliki cadangan minyak setidaknya tujuh miliar barel dan diperkirakan sekitar 900 triliun kaki kubik (m<sup>3</sup>) gas alam, yang menawarkan peluang ekonomi luar biasa bagi negara-negara disekitarnya, seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Robert Beckman, The American Journal of International Law, "The UN Convention on Law of the Sea and The Maritime Dispute of the South China Sea" 107, no. 1 (2013), 143, <http://search.proquest.com/docview/1346762258/D8E44EC4F5264E18PQ/15?accountid=31495>

<sup>6</sup> Euan Graham, "South China Sea," The Lowy Institute, April 29, 2016, <https://www.loyyinstitute.org/issues/south-china-sea>.

<sup>7</sup> Beina Xu, "South China Sea Tensions," *Council on Foreign Relations Backgrounders*, 14 Mei, 2014, <http://www.cfr.org/china/south-china-sea-tensions/p29790>

Terdapat enam negara yang mengklaim dengan tumpang tindih atas wilayah Laut Cina Selatan, karena daerah tersebut kaya akan sumber daya alam termasuk *hydrocarbons*, perikanan dan gas alam yang memiliki kekayaan triliunan dolar Amerika Serikat dalam alur perdagangan global.<sup>8</sup> Semua negara yang memiliki perbatasan dengan kawasan tersebut telah mengklaim sebagian atau semua bagian dari Pulau Spartyly dan ruang maritim beserta sumber daya alam dan kekayaannya.<sup>9</sup> Laut Cina Selatan sebagai daerah yang memiliki posisi penting untuk jalur pelayaran dunia, terutama untuk negara-negara disekitarnya yang dapat dilihat dalam gambar berikut.

**Gambar 1.1** Peta Wilayah Laut Cina Selatan



**Sumber:** *Asia's Cauldron: The South China Sea and The End of Stable Pacific*, hal. 8

<sup>8</sup> Council on Foreign Relations, "China's Maritime Dispute," CFR InfoGuide, [http://www.cfr.org/asia-and-pacific/chinas-maritime-disputes/p31345#!?cid=otr-marketing\\_use-china\\_sea\\_InfoGuide](http://www.cfr.org/asia-and-pacific/chinas-maritime-disputes/p31345#!?cid=otr-marketing_use-china_sea_InfoGuide)

<sup>9</sup> Mark J. Valencia, Jon M. Van Dyke, and Noel A. Ludwig, *Sharing The Resources of The South China Sea*, (Honolulu: University of Hawai'i Press, 1997), 1-2  
[https://books.google.co.id/books?id=gqOKE2a15roC&printsec=frontcover&dq=south+china+sea&hl=en&sa=X&redir\\_esc=y#v=onepage&q=south%20china%20sea&f=false](https://books.google.co.id/books?id=gqOKE2a15roC&printsec=frontcover&dq=south+china+sea&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=south%20china%20sea&f=false)

Laut Cina Selatan tidak diragukan sebagai salah satu jalur laut internasional tersibuk secara global, namun kegiatan di wilayah tersebut tidak hanya menyangkut perdagangan dan navigasi laut global, tetapi juga eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam. Negara-negara pesisir dengan minat khusus terhadap sumber daya alam ini adalah Cina, Taiwan, Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Brunei, serta beberapa negara pemilik perusahaan besar internasional dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, India, Rusia, dan Australia juga terlibat dalam kegiatan komersial. Namun, Cina telah mengklaim sebagian besar wilayah, menyebabkan daerah tersebut berubah menjadi sengketa.<sup>10</sup>

Keseluruhan bagian dari Kepulauan Sparty juga diklaim oleh Cina, Taiwan, dan Vietnam serta Filipina, selain itu Malaysia juga mengklaim atas satu karang yang terletak 200nm dari Brunei Darussalam. Pulau Aba yang merupakan pulau terbesar diduduki oleh Taiwan, diikuti dengan kepulauan lainnya meliputi 25 pulau diduduki oleh Vietnam, delapan pulau oleh Filipina, tujuh pulau oleh Cina, tiga pulau oleh Malaysia, dan satu pulau oleh Taiwan. Kepulauan Paracels diklaim oleh Cina secara paksa dengan mengusir pasukan Vietnam Selatan pada tahun 1974 dan sejak itu wilayah tersebut diduduki oleh negaranya secara eksklusif dan menyangkal keberadaan sengketa kedaulatan teritorial atas Paracels. Namun demikian, pulau-pulau tersebut menjadi sumber ketegangan antara Cina dan Vietnam, khususnya yang berkaitan dengan ekologi perikanan Taiwan dan

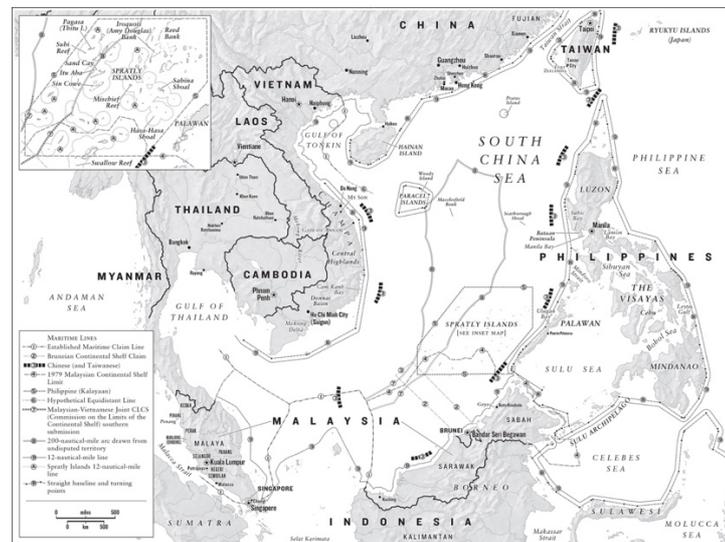
---

<sup>10</sup> The South China Sea Dispute: Opportunities for ASEAN, edisi resmi (Australian Defence College, 2016) hal 1

Vietnam.<sup>11</sup> Karang Scarborough juga termasuk dalam konflik yang wilayahnya diklaim oleh Cina, Filipina dan Taiwan.<sup>12</sup>

Wilayah perrebutan klaim kedaulatan di Laut Cina Selatan oleh negara-negara di sekitarnya, dapat dilihat dalam gambar berikut.

**Gambar 1.2** Peta Wilayah Sengketa Laut Cina Selatan



**Sumber:** *Asia's Cauldron: The South China Sea and The End of Stable Pacific*, hal. 28

Terdapat sepuluh pelabuhan besar untuk perdagangan dan lebih dari setengahnya terletak di dan sekitar perbatasan wilayah sengketa.<sup>13</sup> Terusan Suez yang menghubungkan Laut Mediterania dan Laut Merah melalui Teluk Suez<sup>14</sup> dan

<sup>11</sup> Robert Beckman, "The American Journal of International Law," *The UN Convention on Law of the Sea and The Maritime Dispute of the South China Sea* 107, no. 1 (2013), 142,

<http://search.proquest.com/docview/1346762258/D8E44EC4F5264E18PQ/15?accountid=31495>

<sup>12</sup> *Ibid.*, 132.

<sup>13</sup> IAPH Secretariat, "Data Base of IAPH Member Ports-Others," International Association of Ports and Harbors, <http://www.iaphworldports.org/data-base-of-iaph-member-ports-others>

<sup>14</sup> World Atlas, Map of Suez Canal - Suez Canal Map, History Facts, Suez Canal Location, <https://www.worldatlas.com/aatlas/infopage/suezcanal.htm>

Terusan Panama di Amerika Tengah<sup>15</sup> memang memiliki andil besar dalam lalu lintas perdagangan dunia. Tetapi masing-masing dapat di-kali-lipat-kan sebanyak tiga dan lima belas kali lebih produktif keaktifannya jika dibandingkan dengan lalu lintas kapal tanker minyak yang melewati daerah Laut Cina Selatan.<sup>16</sup> Setelah Perdagangan intra-ASEAN, perdagangan-pun telah meningkat tajam, yang awalnya hanya 29 persen (%) dari total perdagangan ASEAN pada tahun 1980 menjadi 41% pada tahun 2009, hal ini menyebabkan penjagaan kebebasan navigasi menjadi sangat penting untuk sub-kawasan Indo-Pasifik, terutama untuk negara-negara di sekitarnya.<sup>17</sup>

*The Association of South East Asian Nation* (ASEAN) memiliki sepuluh negara anggota yang diantaranya memiliki ketertarikan mendalam terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan yang pertama kali dituangkan melalui *Declaration on the Conduct of Parties in The South China Sea* tahun 1992. Deklarasi tersebut menunjukkan keprihatinan ASEAN atas ketegangan antara Vietnam dan Cina setelah keduanya mengesahkan *Creston Energy Corporation*, yakni perusahaan dari Amerika Serikat yang disahkan untuk mengeksploitasi bank minyak di Vanguard yang terletak di batas landas kontinen Vietnam. Hal berikutnya yang menjadi keprihatinan adalah penyerahan undang-undang tentang laut teritorial pada tanggal 25 Februari 1992, serta penetapan

---

<sup>15</sup> World Atlas, Panama Map, worldatlas.com, <https://www.worldatlas.com/na/pa/where-is-panama.html>

<sup>16</sup> Robert D. Kaplan, "Why the South China Sea is so Crucial," *Business Insider Indonesia*, 20 Februari, 2015, <http://www.businessinsider.co.id/why-the-south-china-sea-is-so-crucial-2015-2/?r=US&IR=T#j7aW0dHju5mJYcGm.97>

<sup>17</sup> Beina Xu, "outh China Sea Tensions," *Council on Foreign Relations Backgrounders* (14 Mei, 2014) <http://www.cfr.org/china/south-china-sea-tensions/p29790>

kedaulatan mutlak Cina atas Kepulauan Paracels dan Sparty. Para menteri luar negeri dari negara anggota ASEAN menyadari bahwa isu Laut Cina Selatan melibatkan aspek sensitif terhadap kedaulatan dan yurisdiksi, serta perkembangan dan pertumbuhan yang terjadi di daerah tersebut yang akan berdampak langsung terhadap perdamaian dan kestabilan kawasan. Deklarasi tersebut meminta pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui cara damai dan mendukung kemungkinan kerjasama di Laut Cina Selatan.<sup>18</sup>

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hukum laut mengesahkan sebuah hukum rezim yang komprehensif untuk mengatur semua penggunaan lautan dan sumber daya-nya di dunia. Hal ini mengukuhkan gagasan bahwa semua masalah ruang di laut selalu saling terkait secara erat dan perlu ditangani secara keseluruhan dan sebagai penanda puncak kerja yang lebih dari empat belas tahun yang melibatkan partisipasi lebih dari 150 negara yang mewakili semua wilayah di dunia, termasuk didalamnya sistem hukum dan politik. Adopsi konvensi tersebut diwujudkan dalam satu instrumen aturan tradisional untuk penggunaan lautan. Pada saat yang sama, konsep hukum dan rezim baru diperkenalkan dan memberikan kerangka kerja untuk pengembangan lebih lanjut dari daerah-daerah laut tertentu di hukum laut. Konvensi mulai berlaku pada 16 November 1994 sesuai pasal 308 bersamaan dengan rezim baru yang diakui secara global, berurusan dengan semua hal berkaitan dengan hukum laut yang disebut

---

<sup>18</sup> Tran Truy, *Recent Developments in the South China Sea: Implications for Regional Security and Cooperation*, (Washington DC, Central for Strategic and International Studies, 2012).  
[https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy\\_files/files/publication/110629\\_Thuy\\_South\\_China\\_Sea.pdf](https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/110629_Thuy_South_China_Sea.pdf)

*United Nations Convention Law of The Sea (UNCLOS)*.<sup>19</sup> Hak dan kewajiban setiap negara di dunia dalam lingkup kelautan termasuk isi dari UNCLOS, didalamnya juga mengatur tentang hak-hak sesuai sejarah dan klaim garis perbatasan di daerah Laut Cina Selatan, tidak terkecuali daerah *Nine-Dash-Line* milik Cina.<sup>20</sup>

*Nine-Dash-Line* adalah garis demarkasi dengan anggapan kontroversial yang digunakan oleh Cina untuk klaimnya atas wilayah dan perairan di Laut Cina Selatan, garis klaim tersebut ditujukan terutama untuk Scarborough *Shoal*, kepulauan Paracel, dan kepulauan Sparty, sebagai garis pulau yang paling penting dalam sengketa ini. Beijing mulai mengeluarkan dokumen pada akhir 2012 dengan isi peta wilayah yang disengketakan berdasarkan garis *Nine-dash-line*, hal ini semakin mengundang reaksi kecaman dari dunia internasional, termasuk negara-negara yang memperebutkan garis perbatasan yang di klaim Cina. Namun, Cina bersikeras atas garis legitimasi historis berdasarkan survei dan ekspedisi, aktivitas nelayan, dan patroli angkatan laut sejak abad ke-lima belas.<sup>21</sup>

Terlepas klaim ini, masalah Laut Cina Selatan memiliki implikasi yang jauh lebih luas dalam hal keamanan, perdamaian, stabilitas, dan keamanan maritim di wilayah ini, karena kepentingan negara-negara pesisir berpusat pada batas-batas

---

<sup>19</sup> Office of Legal Affairs, "United Nations on the Law of The Sea of 10 December 1982: Overview and Full Text," Division for Ocean Affairs and The Law of The Sea, United Nations, [http://www.un.org/depts/los/convention\\_agreements/convention\\_overview\\_convention.htm](http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm)

<sup>20</sup> Joseph Klein, "South China Sea: UN Law fo the Sea Arbitration Tribunal Sinks the Rule of Law," *Foreign Policy Journal* (20 Agustus, 2016) <http://www.foreignpolicyjournal.com/2016/08/20/south-china-sea-un-law-of-the-sea-arbitration-tribunal-sinks-the-rule-of-law/>

<sup>21</sup> Beina Xu, "South China Sea Tensions," *Council on Foreign Relations Backgrounders* (14 Mei, 2014) <http://www.cfr.org/china/south-china-sea-tensions/p29790>

maritim, kedaulatan teritorial, dan untuk memanfaatkan sumber daya kawasan. Sementara, banyak kepentingan negara lain adalah untuk memastikan jalur komunikasi laut yang aman dan untuk memenuhi strategi geopolitik nasional.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

### **1.2.1. Deskripsi Masalah**

Pada tahun 1970an, beberapa negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina<sup>22</sup> mulai mengklaim keberadaan kepulauan Spratly dan pulau-pulau lainnya di wilayah Laut Cina Selatan, yang berdasarkan klaim kedaulatan Cina diduga memiliki kemungkinan akan sumber daya alam dan area penangkapan ikan dengan perkiraan sebesar sebelas miliar barel minyak yang belum dimanfaatkan dan 190 triliun kaki kubik gas alam. Cina berpendapat bahwa dibawah hukum internasional, militer asing tidak dapat melakukan kegiatan militer di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), tetapi menurut Amerika Serikat (AS), setiap negara harus memiliki kebebasan navigasi atas jalur laut tanpa memiliki keharusan untuk memberi tahu penggugat mengenai kegiatan militer.<sup>23</sup>

Tahun 2010, administrasi pemerintahan kepresidenan Barrack Obama dengan jelas mengisyaratkan melalui berbagai jalur diplomasi dan peningkatan militer dengan negara-negara yang memiliki kepentingan di Laut Cina Selatan bahwa AS

---

<sup>22</sup> Jamil Flores dan Jun Abad, "History: The Founding of ASEAN," Association of South East Asian Nation, <http://asean.org/asean/about-asean/history/>

<sup>23</sup> Ash Carter, "Territorial Dispute in The South China Sea," *Global Conflict Tracker*, 2015 updated 22 September 2017, <https://www.cfr.org/interactives/global-conflict-tracker#!/conflict/territorial-disputes-in-the-south-china-sea>

mempertimbangkan untuk menetapkan stabilitas berbasis hukum yang merupakan suatu kepentingan nasional bagi negaranya. Hal ini didukung oleh resolusi damai dengan tidak menggunakan kekuatan koersif dalam sengketa untuk hak kedaulatan dan maritim. Pemerintah AS memiliki tujuan *freedom of navigation operation* (FONOP) di kawasan tersebut, termasuk perdagangan tanpa hambatan serta pelaksanaan kebebasan laut lepas yang terasosiasi dan tidak bertentangan dengan kegiatan militer Cina.<sup>24</sup>

Amerika Serikat memiliki kepentingan nasional yang mendasari alasan dan tujuan atas keterlibatan negaranya<sup>25</sup> di wilayah sengketa, walaupun tidak memiliki hubungan langsung dengan wilayah Laut Cina Selatan, bahkan hingga detik ini, tidak menandatangani UNCLOS yang mengangkat tentang hukum internasional di lautan.<sup>26</sup> Negara yang jauh dari wilayah laut tersebut dipertanyakan kepentingannya dalam sengketa yang telah berlangsung, karena resiko yang sangat signifikan, terutama atas hak untuk mengeksploitasi sumber daya cadangan minyak dan gas diikuti dengan luasnya wilayah laut. Bersekutu dengan Filipina dan Jepang menjadi salah satu alasan mengapa AS tetap memberikan dukungan militer dan ekonomi terhadap resolusi sengketa selain kebebasan bernavigasi. Hal ini menjadi isu perdebatan dan salah satu faktor bagi AS dan Cina, begitu pula dengan hak kapal

---

<sup>24</sup> Michael McDavitt, *The South China Sea: Assessing U.S. Policy and Options for the Future*, CNA's Occasional Paper, CNA Strategic Research (November 2014)

<sup>25</sup> Committee of Foreign Relations, "Safeguarding American Interest in the East and South China Seas," United States Senate, <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-114shrg96850/html/CHRG-114shrg96850.html>

<sup>26</sup> Ben Cardin, "The South China Sea is The Reason United States Must Ratify UNCLOS," *ForeignPolicy.com*, (13 Juli, 2016) <http://foreignpolicy.com/2016/07/13/the-south-china-sea-is-the-reason-the-united-states-must-ratify-unclos/>

militer negara untuk beroperasi dalam dua ratus mil ZEE Sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan UNCLOS menegaskan pentingnya hukum internasional saat ini, tetapi ketidak-ikutsertan AS sebagai penanda-tangan sebagai negara *super power* menjadikan semua hal yang terkait lebih signifikan.

Ketegangan ini dibentuk oleh meningkatnya kekhawatiran banyak pihak tentang pertumbuhan kekuatan militer Cina dan intensi regional yang telah mulai memodernisasi para pasukan militer maritim dan kemampuan angkatan laut untuk menegakkan kedaulatan dan yurisdiksi klaim negaranya, bahkan dengan menggunakan kekerasan jika memang diperlukan. Pada saat yang sama, AS menempatkan pasukan di wilayah sengketa yang menjadi resiko terjadinya konflik, karena berpotensi ke arah penolakan akses angkatan laut negara di daerah Laut Pasifik barat. Mengingat pentingnya hubungan AS dan Cina serta kawasan Asia-Pasifik di bidang ekonomi dan pertahanan global, kedua negara memiliki kepentingan besar dalam mencegah berbagai sengketa di Laut Cina Selatan dari peningkatan militer Cina.<sup>27</sup>

Amerika Serikat mulai terlibat kerjasama langsung dengan ASEAN sebagai mitra dialog pada tahun 1977, pada tahun 1990an kerjasama pembangunan meningkat secara dramatis melalui program ekonomi yang berfokus pada perdagangan, investasi, alih teknologi, dan pendidikan. Tidak berhenti di isu-isu tersebut, AS dan ASEAN melipatgandakan kerjasama mereka dalam banyak hal melalui diskusi politik dan keamanan yang terfokus pada peran Amerika Serikat

---

<sup>27</sup> Bonnie Glaser, "Armed Clash in The South China Sea," *Council on Foreign Relations* (April, 2012) <http://www.cfr.org/asia-and-pacific/armed-clash-south-china-sea/p27883>

dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara melalui sengketa Laut Cina Selatan dan ancaman terorisme.<sup>28</sup>

Pada masa pemerintahan Barrack Obama, Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan pendekatan yang lebih tegas ke wilayah sengketa Laut Cina Selatan, hal ini mengakibatkan ketegangan dengan Cina mulai meningkat. Administrasi kepresidenan berpendapat bahwa mereka harus memainkan peran yang lebih besar dalam persengketaan karena negara-negara di Asia Tenggara mulai melihat kesempatan diluar ASEAN untuk mendapatkan dukungan. Walaupun dengan keterlibatan AS yang lebih dekat, Cina tetap menegaskan bahwa klaim wilayah mereka tidak dapat dinegosiasikan. Laut Cina Selatan memberikan harapan lebih untuk membentuk kembali dan menguatkan aliansi AS di Asia, tetapi dengan jangkauan maritim dan kekuatan Cina, AS harus membangun kelompok aliansi militer Asia yang lebih besar, komprehensif, dan terintegrasi, bahkan ada kemungkinan perlu dilakukannya pengalihan sebagian besar fokus proyeksi kekuatan ke kemitraan Asia.<sup>29</sup>

Kebijakan Amerika Serikat terhadap sengketa Laut Cina Selatan telah aktif kembali dengan menekankan isi dari kebijakan tersebut sebagai tanggapan atas peristiwa-peristiwa yang mengancam kepentingan nasional negaranya. Meskipun tidak mengklaim kedaulatan atas fitur darat yang diperebutkan, hal tersebut telah meningkatkan perhatian dan keterlibatannya dalam upaya pengelolaan dan

---

<sup>28</sup> US Mission to ASEAN, "US Engagement to ASEAN," US-ASEAN (2017) <https://asean.usmission.gov/our-relationship/policy-history/usasean/>

<sup>29</sup> Joshua Kurlantzick, "Growing US Role in The South China Sea," Council on Foreign Relations, (2011) <https://www.cfr.org/expert-brief/growing-us-role-south-china-sea>

penyelesaian perselisihan, dengan kepentingan terbesarnya dalam hubungan AS dengan negara-negara anggota ASEAN. Usaha-usaha yang dilakukan melalui kebijakannya akan memberikan akses untuk tetap memainkan peran penting dalam melindungi negara-negara ASEAN agar lebih memihak ke AS dibandingkan memihak Cina.

### **1.2.2. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi dengan mengarahkan analisa pada teori neo-realisme, yaitu dengan menganalisis bagaimana peran suatu negara kepada negara yang lain baik dalam hal hubungan antar negara dan resolusi konflik, terutama untuk menjunjung tinggi kepentingan nasional tiap-tiap negara selama konflik Laut Cina Selatan dengan *inaction* kebijakan Amerika Serikat wilayah sengketa. Walaupun penulis akan menganalisis proses peran dan kepentingan masing-masing negara setelah terjadinya konflik di wilayah perbatasan laut yang spesifik, tetapi penelitian akan difokuskan pada tidak adanya perubahan signifikan dalam kebijakan-kebijakan Amerika Serikat atas dasar konflik Laut Cina Selatan di tahun 2008-2016. Analisa identitas negara saat periode pertama dan kedua kepresidenan Barrack Obama akan menjadi rujukan terkait perubahan kebijakan serta kepentingan yang terjadi selama sengketa berlangsung.

Untuk memahami neo-realisme dan hubungannya dengan peran tiap negara dan identitas pengambilan kebijakan serta kepentingan suatu negara terutama Amerika Serikat, maka analisa akan dibatasi dengan konsep politik luar negeri dan kepentingan nasional yang saling berhubungan. Identitas dalam hal ini berfokus

pada bagaimana perkembangan hubungan yang terjadi, saling memegang peran penting dalam pemahaman mengenai hubungan kepentingan nasional AS melalui sengketa Laut Cina Selatan. Sementara, berkaitan dengan kepentingan, penulis akan lebih befokus kepada hubungannya dengan alasan *inaction* AS, terutama dengan program kepentingan keamanan sebagai pokok bahasan dari sengketa.

### **1.2.3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi masalah diatas, penulis merujuk ke dalam suatu pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut: **Mengapa Amerika Serikat memilih untuk *inaction* dalam sengketa Laut Cina Selatan pada tahun 2008-2016?**

## **1.3. Tujuan dan Manfaat**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui apa alasan Amerika Serikat tidak melakukan perubahan kebijakan yang signifikan (*inaction*) dalam menanggapi sengketa di wilayah Laut Cina Selatan pada tahun 2008-2016

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah peneliti diharapkan dapat memberi gambaran kerangka pemikiran terhadap pembaca dan dapat mengetahui sekaligus memahami hubungan antara sengketa di wilayah Laut Cina Selatan dengan dampaknya terhadap ketidak-berubahan signifikan (*inaction*) kebijakan Amerika Serikat yang bersifat dinamis, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi aktor

untuk dapat memenuhi kepentingan nasional melalui kebijakan yang diambil dan dimiliki oleh negara yang secara geografis letaknya jauh dari wilayah sengketa.

#### 1.4. Kajian Literatur

Penulis akan mengkaji dari dua literatur yaitu penelitian dan jurnal yang sudah ada terkait dengan isu yang akan dikaji oleh penulis. Kajian ini bertujuan untuk melihat kembali tujuan penelitian ini agar semakin efektif dalam menjabarkan masalah dan hipotesis dalam pertanyaan penelitian. Berangkat dari maksud dan tujuan tersebut, penulis mengkaji dari penelitian **Michael McDevitt** yang berjudul **The South China Sea: Assessing U.S. Policy and Options for the Future**<sup>30</sup>, jurnal yang ditulis oleh **Prashanth Parameswaran** dengan judul **“The Power of Balance: Advancing US-ASEAN Relations Under the Second Obama Administration”**<sup>31</sup>, dan *paper* yang ditulis oleh **Jeffrey Bader, Kenneth Lieberthal, dan Michael McDevitt** dengan judul **“Keeping the South China Sea in Perspective”**<sup>32</sup>

*Rear Admiral* Michael McDevitt adalah seorang veteran dari angkatan laut Amerika Serikat dan merupakan senior di CNA Strategic Studies.<sup>33</sup> CNA Strategic

---

<sup>30</sup> Michael McDevitt, *The South China Sea: Assessing U.S. Policy and Options for the Future*, CNA's Occasional Paper, CNA Strategic Research (November 2014)

<sup>31</sup> Prashanth Parameswaran, *“The Power of Balance: Advancing US-ASEAN Relations Under The Second Obama Administration”*, The Fletcher Forum of World Affairs Journal 37, no. 1 (Winter 2013)

<sup>32</sup> Jeffrey Bader, Kenneth Lieberthal, dan Michael McDevitt, *“Keeping the South China Sea in Perspective,”* Brookings Education, <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/south-china-sea-perspective-bader-lieberthal-mcdevitt.pdf>

<sup>33</sup> Publishing Office, *“Rear Admiral Michael McDevitt,”* A Strategic Studies, <https://www.uscc.gov/sites/default/files/Rear%20Admiral%20Michael%20McDevitt%20Biography.pdf>

Studies didirikan pada tahun 1942 yang merupakan lembaga analisis untuk isu-isu global, bekerja sama dengan U.S. Department of State, U.S. Department of Defense, The White House, The National Aeronautics and Space Administration (NASA).<sup>34</sup> Didalam penelitian tersebut, McDavitt menjelaskan tentang kebijakan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan melalui pendekatan dengan tujuan wilayah yang memiliki generalisasi, perdamaian, keseimbangan, dan non-kontroversi.

Ketegangan dimulai pada saat AS berargumentasi bahwa UNCLOS mengizinkan negara untuk melatih “High Seas Freedom”, termasuk didalamnya operasi militer yang damai di sekitar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara sekitar. Sementara itu, Cina tidak setuju dan beranggapan bahwa cara yang dilakukan AS sama sekali tidak menunjukkan aktivitas perdamaian, kedua argumen ini sampai pada puncaknya saat pengawas dari angkatan laut AS menghadang pesawat tempur angkatan laut milik Cina.<sup>35</sup>

McDavitt juga menjelaskan beberapa kepentingan nasional AS adalah “*establishing rule-based stability in the South China Sea (SCS) to be an important US National Interest*”. Berdasarkan pernyataan dari pemerintah AS, bahwa mereka mencari kebebasan bernavigasi di wilayah sengketa, terutama untuk perdagangan dan komersial dibantu oleh keamanan dari militer serta angkatan laut,<sup>36</sup> diikuti dengan kebijakan luar negeri terhadap wilayah tersebut. Kesaksian dari Kongres

---

<sup>34</sup> CNA, “About Us,” CNA: A non Profit Research and Analysis Organization, <https://www.cna.org/about/>

<sup>35</sup> Michael McDavitt, *The South China Sea: Assessing U.S. Policy and Options for the Future*, CNA’s Occasional Paper, CNA Strategic Research (November 2014), IV

<sup>36</sup> Michael McDavitt, *The South China Sea: Assessing U.S. Policy and Options for the Future*, CNA’s Occasional Paper, CNA Strategic Research (November 2014), VI

AS menyatakan bahwa semua kebijakan harus dilakukan tanpa paksaan dan kekerasan, sesuai dengan hukum internasional, *Code of Conduct* aktif, mekanisme resolusi sengketa, dan tanpa memihak siapapun.<sup>37</sup> Kerangka yang dipergunakan untuk melakukan analisa adalah kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional Amerika Serikat dalam menanggapi sengketa Laut Cina Selatan tidak memiliki atau mengalami perubahan yang signifikan.

Parameswaran adalah seorang penulis jurnal di The Tufts University, Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Ia menulis bahwa masa pemerintahan kepresidenan Obama yang kedua memiliki warisan dari masa pemerintahan pertama, yaitu “*rebalancing*” dalam hal komitmen dan sumber daya Amerika Serikat terhadap wilayah Asia-Pasifik yang didalamnya memiliki peran penting dan krusial yaitu ASEAN.<sup>38</sup> Beberapa tahun terakhir di administrasi pemerintahannya, AS menunjuk perwakilan negara pertama untuk ASEAN terutama untuk menguatkan aliansi dan hubungan kerjasama dengan Filipina, Indonesia, dan Singapura, termasuk didalamnya untuk membangun Burma kembali, dan menggalangkan inisiasi bisnis serta ekonomi untuk membantu negara-negara anggota ASEAN. Asia Tenggara merupakan daerah inti yang memiliki tingkat kepentingan tinggi untuk para pembuat kebijakan dan tujuan investasi terbesar AS karena memuat pasar luar negeri terbesar ke-empat di dunia. Hal ini membuat masa

---

<sup>37</sup> Ibid., V

<sup>38</sup> Prashanth Parameswaran, “*The Power of Balance: Advancing US-ASEAN Relations under the second Obama Administration*”, *The Fletcher Forum of World Affairs Journal* 37, no. 1 (Winter 2013), 123

pemerintahan kedua Obama memikirkan dan mempertimbangkan langkah yang akan diambil untuk mencapai hubungan AS-ASEAN beberapa waktu kedepan.<sup>39</sup>

Simposium AS-ASEAN tahun 2007, Kurt Campbell, Sekretaris Asisten AS memberikan pernyataan perihal isu Asia dan Pasifik Timur mengusulkan untuk merubah “*balance of power*” menjadi “*power of balance*” agar mencapai keseimbangan dalam banyak isu termasuk keamanan tradisional dan non-tradisional. Hal ini sangat mendukung kedua pihak untuk menangani segala tantangan dalam mengelola hubungan.<sup>40</sup>

Masa pemerintahan kepresidenan kedua Obama memiliki empat hal yang dianggap sebagai tantangan penting dalam meningkatkan kekuatan ikatan dan keseimbangan untuk mencapai keseimbangan hubungan, yaitu kekuatan bilateral dan multilateral dengan membangun kepercayaan dalam diplomasi Asia dalam meningkatkan kepentingan ancaman keamanan trans-nasional, termasuk ASEAN yang memiliki peran penting.<sup>41</sup> Yang kedua dalam isu ekonomi dan keamanan yang harus diseimbangkan, administrasi Obama sudah melakukan kemajuan dalam negosiasi di *Trans-Pacific Partnership* (TPP)<sup>42</sup>, dengan adanya pembangunan dalam isu ekonomi di infrastruktur dan peningkatan keamanan yang ditujukan pada pembangunan keamanan dalam segala aspek, terutama dalam hak asasi manusia.<sup>43</sup>

---

<sup>39</sup> Prashanth Parameswaran, “*The Power of Balance: Advancing US-ASEAN Relations under the second Obama Administration*”, *The Fletcher Forum of World Affairs Journal* 37, no. 1 (Winter 2013), 124

<sup>40</sup> *Ibid.*, 124

<sup>41</sup> Prashanth Parameswaran, “*The Power of Balance: Advancing US-ASEAN Relations under the second Obama Administration*”, *The Fletcher Forum of World Affairs Journal* 37, no. 1 (Winter 2013), 125

<sup>42</sup> *Ibid.*, 126

<sup>43</sup> *Ibid.*, 128

Tantangan ketiga adalah kepentingan dalam menghadapi dan berkerja sama dengan Cina, karena faktanya, negara-negara di ASEAN memiliki hubungan ekonomi yang sangat kuat, tetapi ragu soal niat dan intensi di masa depan selama kekuatannya terus mengingkat, serta menunjukkan tanda-tanda ketegasan pada arah evolusi Cina yang tidak dapat ditebak.<sup>44</sup>

Keempat adalah tantangan dalam hal lingkup komitmen AS dan keperluan sumber daya untuk mencapainya. Kebanyakan negara-negara di Asia ragu akan komitmen AS dalam jangka waktu yang panjang yang disebabkan oleh peristiwa di masa lalu. Hal ini memicu AS untuk lebih menunjukkan niat baiknya dalam membangun hubungan dan kerjasama, tapi merupakan bagian dari usaha berkelanjutan yang dilakukan untuk mempertahankan hubungan baik beberapa dekade kedepan.<sup>45</sup>

Jeffrey A. Bader adalah rekan senior dari John L. Thornton China Center dengan keahliannya di isu kebijakan luar negeri dan Kenneth G. Lieberthal juga sebagai rekan senior professor perguruan tinggi. Mereka berdua bersama Michael McDevitt menulis sebuah *paper* penelitian tentang bagaimana Amerika Serikat dapat mengejar kepentingannya, serta meredakan sengketa di Laut Cina Selatan. AS berusaha untuk mempromosikan dinamika ekonomi dan saling ketergantungan Asia-Pasifik untuk mengurangi ketegangan klaim wilayah dan ketegangan di

---

<sup>44</sup> Ibid., 129

<sup>45</sup> Ibid., 132

wilayah ini. Sebaliknya, sengketa daerah maritim di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan semakin mengancam tujuan utama dari kebijakan AS-Asia.

Sengketa Laut Cina Selatan memperlumaskan permasalahan Cina dengan Filipina, Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Taiwan. Kebanyakan negara-negara tersebut yang memiliki klaim teritorial maritim bersifat tumpang tindih di wilayah peningkatan nasionalisme, resiko konflik yang secara sengaja dapat ditingkatkan, konflik klaim terhadap tingginya potensi sumber daya, resiko terhadap *freedom of navigation* di ZEE, dan perselisihan mengenai interpretasi serta penerapan hukum internasional, terutama UNCLOS. Sementara, kehadiran keamanan AS dan tindakan terkait sengketa telah memperkecil kemungkinan konflik berskala besar dan memfasilitasi timbulnya ekonomi di Asia.<sup>46</sup>

Kepentingan AS yang secara spesifik terkait dengan FONOP, hukum dan norma internasional, hubungan dengan aliansi dan mitra penting, dan ekspektasi resolusi sengketa secara damai. Kepentingan *vital* negaranya juga dalam menyediakan kepastian untuk sekutunya di wilayah ini, karena hal tersebut akan kehadiran keamanan secara kuat dan mencegah kekosongan kekuasaan dari bangkitnya Cina. Hal tersebut membutuhkan keterlibatan aktif dan terus berlanjut di sekitar wilayah sengketa dengan mengambil langkah yang mendinginkan perilaku bertanggung jawab serta mencegah pemaksaan oleh semua pihak. Pada pertemuan Forum Regional ASEAN, Hillary Clinton sebagai Sekretaris Negara memberikan

---

<sup>46</sup> Jeffrey Bader, Kenneth Lieberthal, dan Michael McDevitt, "Keeping the South China Sea in Perspective," Brookings Education, <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/south-china-sea-perspective-bader-lieberthal-mcdevitt.pdf>, 2-3

penjelasan prinsip-prinsip untuk membimbing kebijakan pemerintah AS di Laut Cina Selatan, yaitu peran positif diikuti dengan strategi diplomasi serta penerapannya yang berwawasan, komprehensif, dan disiplin untuk sekutu.<sup>47</sup>

AS sangat menekankan kepentingannya di FONOP, *freedom of overflight*, perdagangan tanpa hambatan, resolusi sengketa secara damai dan netral dari paksaan, penyesuaian klaim terhadap UNCLOS, proses kolaborasi diplomatik dalam penyelesaian sengketa teritorial, serta negosiasi *Code of Conduct*. Karena itu, AS harus melakukan menjelaskan posisinya dengan tindakan.

### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Penulis memahami pentingnya dasar pemikiran yang akan mengarahkan hasil dari penulisan ini. Untuk memahami bagaimana sengketa Laut Cina Selatan dalam politik luar negeri Amerika Serikat, dilihat dari pengambilan kebijakan, digunakan teori neo-realisme dan hubungan konsep *national interest* dengan *state action-inaction*, serta dukungan konsep *foreign policy analysis*.

Neo-realisme merupakan teori yang berlandaskan teori realisme dalam Ilmu hubungan internasional atau dapat disebut realisme struktural yang sejalan dengan konsep pentingnya kekuasaan dari realisme untuk memahami politik dunia, tetapi berbeda dengan fokus realisme klasik. Teori ini menekankan tidak adanya otoritas

---

<sup>47</sup> Jeffrey Bader, Kenneth Lieberthal, dan Michael McDevitt, "Keeping the South China Sea in Perspective," Brookings Education, <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/south-china-sea-perspective-bader-lieberthal-mcdevitt.pdf>, 3-5

sentral dalam sistem internasional melainkan distribusi relatif dari kekuasaan di antara negara-negara sebagai penyebab struktural dalam kompetisi keamanan

Menurut Kenneth Waltz, struktur politik domestik membantu menjelaskan bagaimana cara kerja politik internasional, bukan motivasi para aktor yang terlibat. Hal ini dapat dikategorikan dengan prinsip pokok yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Subordinasi dan Hierarki. Aktor yang berada dalam hubungan politik dapat digambarkan sebagai otoritas. Maka dari itu, hierarki dapat diidentifikasi dengan politik dalam negeri dengan alasan bahwa suatu negara yang rawan perang dari anarki, dapat diatasi dengan struktur politik otoriter. Tetapi, karena otoritas menyeluruh ini hilang dalam politik dunia, politik internasional yang dikaitkan dengan anarki, dapat menghilangkan perbedaan fungsional antar aktor.<sup>48</sup>

Sesuai dengan sudut pandang neo-realisme, diantara sistem internasional yang anarkis, negara harus menyadari pendistribusian kekuasaan dalam sistem internasional dan peka terhadap keuntungan relatif, untuk memastikan keamanan mereka sendiri. Dalam mencapai tujuan hidup yang utama dalam sistem *self-help*, negara harus masuk ke dalam kompetisi mengenai distribusi kemampuan militer, terutama karena mereka tidak pernah yakin tentang niat negara-negara lain. Setelah keadaan keamanan dihadapkan dengan musuh, akan menjadi cukup kuat untuk dapat memilih penyeimbangan kekuasaan (*balance of power*). Menurut ahli neo-realisme, terdapat dua pilihan keseimbangan kekuasaan dengan keadaan yang beresiko untuk memilih peningkatan kapasitas militer negara, yaitu pengeluaran

---

<sup>48</sup> Kenneth Waltz, *Theory of International Politics* (Massachusetts: Addison-Welsey Publishing Company, 1979), 102.

militer (*internal balancing*) atau dapat berusaha membangun aliansi atau sekutu strategis agar dapat bersama-sama menyeimbangkan kekuatan untuk melawan kekuatan yang lebih besar (*external balancing*).<sup>49</sup> Menyeimbangkan kekuatan dalam melawan kekuatan yang lebih besar, ditentukan oleh struktur anarkis dari sistem internasional yang dianggap sebagai otomatisme. Negara harus menyeimbangkan kekuatannya karena tekanan struktural anarki yang tidak dapat ditahan. Konsekuensinya, hasil dari politik internasional adalah konflik antara kekuatan besar yang disebabkan oleh struktur tertentu dari sistem internasional pada waktu tertentu.<sup>50</sup> Dengan kata lain, neo-realisme dalam hubungan internasional memiliki lingkup dalam menghindari perang, pencari kekuasaan, kompetisi keamanan dan militer, serta pembentukan aliansi.

Dalam sejarah Ilmu Hubungan Internasional sebagai sebuah disiplin, neo-realisme biasanya disebut realisme defensif, sebagai lawan pendekatan teoritis tersebut. Negara-negara yang mencoba untuk memaksimalkan kekuatan mereka dan menjadi hegemon terkemuka di dunia, tidak akan kondusif karena struktur dari sistem internasional secara otomatis akan mengasikkan kekuatan penyeimbang, yang akan mengarah ke penurunan hegemon tersebut. Negara harus lebih mengejar kepemilikan sejumlah kekuasaan yang tepat.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Christopher Layne, *Why New Great Powers Will Rise*, International Security Vol. 17, no. 4 (Spring, 1993), 12.

<sup>50</sup> Scott Burchill et al., *Theories of International Relations* (New York: Palgrave Macmillan, 2009,) 37.

<sup>51</sup> Kenneth Waltz, *Theory of International Politics*, (New York: McGraw-Hill, 1979), 40

Morgenthau dari pandangan Realisme berargumen bahwa kepentingan adalah standar abadi dimana tindakan politik harus dinilai dan diarahkan, karena tujuan kebijakan luar negeri didefinisikan dalam hal kepentingan nasional.<sup>52</sup> Sementara Neo-Realisme Waltz menempatkan lebih sedikit penekanan pada kepentingan nasional sebagai panduan perilaku negara di dunia internasional. Baginya, kepentingan nasional timbul sebagai sesuatu yang tidak dapat terbantahkan, tetapi lebih menarik perihal bagaimana sebuah negara mengadopsi cara untuk mencapainya dengan mengatakan:

*“From an assumed interest, no useful inferences can be made unless we can figure out what actions are required for its successful pursuit...to say that a state seeks its own preservation or pursues its national interest becomes interesting only if we can figure out what the national interest requires a country to do.”*<sup>53</sup>

Pada dasarnya kepentingan nasional terdiri dari dari kelangsungan hidup negara yang harus diutamakan sebelum tujuan kebijakan lainnya dan hal ini dilakukan tanpa ada batasan prioritas yang mengharuskan penanganan isu keamanan, karena kapasitas sebuah negara untuk mencapai keamanannya ditentukan oleh hubungan dengan negara-negara lain dibandingkan kekuatan absolutnya.

---

<sup>52</sup> Hans Morgenthau, *Politics Among Nation*, (New York: McGraw-Hill, 1985), hal 9 dan 258

<sup>53</sup> Kenneth Waltz, *Theory of International Politics*, (New York: McGraw-Hill, 1979), 134

Kenneth Waltz menambahkan:

*“To say that a country acts according to its national interest means that, having examined its security requirements, it tries to meet them. That is simple; it is also important. Entailed in the concept of national interest is the notion that diplomatic and military moves must at times be carefully planned lest the survival of the state be in jeopardy. The appropriate state action is calculated according to the situation in which the state finds itself. Great powers, like large firms, have always had to allow for the reactions of others. Each state chooses its own policies. To choose effectively requires considering the ends of the state in relation to its situation.”*<sup>54</sup>

Saat Realisme mengklaim negara-negara mencari kekuatan absolut, tetapi Neo-realisme mengklaim bahwa tiap negara mencari keamanan yang dapat diperoleh dengan kekuatan relatif. Hal ini disebabkan karena negara tidak memiliki kepribadian agresif atau bawaan kebutuhan untuk mendominasi negara lainnya, namun didorong untuk memaksimalkan kekuatan tersebut sebagai cara terbaik untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup melalui kebijakan luar negeri.<sup>55</sup>

Analisa kebijakan luar negeri menyediakan berbagai cara untuk memahami perilaku dan pentingnya negara, sub-negara, dan non-negara sebagai aktor dalam

---

<sup>54</sup> Kenneth Waltz, *Theory of International Politics*, (New York: McGraw-Hill, 1979), 134

<sup>55</sup> Scott Burchil, *The National Interest in International Relations Theory*, (Palgrave Macmillan UK, May 11, 2005) hal 45-46

pembentukan tindakan yang akan diambil.<sup>56</sup> Bagaimana satu negara bekerja di sistem internasional, dijelaskan di konsep ini dalam ilmu studi Hubungan Internasional yang menekankan peran dan pengaruh kendala struktural pada sistem internasional, sementara konsep kebijakan luar negeri berfokus pada kemungkinan yang melekat pada lembaga manusia untuk memengaruhi dan bahkan mengubah sistem internasional. Valerie Hudson mengatakan:

*“The single most important contribution of FPA to IR theory is to identify the point of theoretical intersection between the primary determinants of state behaviour: material and conceptual factors. The point of intersection is not the state, it is human decision-makers. If our IR theories contain no human beings, they will erroneously paint for us a world of no change, no creativity, no persuasion, no accountability.”*<sup>57</sup>

Kepentingan nasional sangat menentukan dan krusial dalam memahami pilihan kebijakan luar negeri dan respon yang akan diberikan oleh aktor lain. Ide *balance of power* telah memiliki pengaruh besar atas pembuatan kebijakan luar negeri, karena asumsi yang mendasarinya adalah sistem anarki yang dapat membantu rasa ketidakstabilan menjadi berkurang.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Christopher Alden, *Foreign Policy Analysis* (London: University of London, 2006), 13.

<sup>57</sup> Valerie M. Hudson, *Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations*, *Foreign Policy Analysis* 1, No. 1 (March, 2005), 3.

<sup>58</sup> Christopher Alden, *Foreign Policy Analysis* (Routledge, 2012), 19

Kebijakan luar negeri dalam definisi tradisional adalah kebijakan negara terhadap aktor eksternal, terutama ke negara lain. Perbedaan kontras terhadap neo-realisme, terutama tidak melihat sistem internasional, tetapi menawarkan perspektif ‘*inside-out*’ untuk memahami proses pengambilan keputusan dalam keadaan yang menghasilkan kebijakan yang diarahnya ke negara lain (*level of analysis*). Definisi tradisional ini telah menjadi perbincangan yang bermasalah dari waktu ke waktu, terutama dalam globalisasi dan integrasi regional.<sup>59</sup>

Teori neo-realisme memiliki hubungan dengan negara dan kebijakan luar negeri. Hal ini mengisi celah dalam studi keamanan yang membahas tentang peran negara dan interaksi tiap variabel pendukung dalam membentuk kebijakan luar negeri. Berbaginya perhatian teori realisme dan neo-realisme terhadap hubungan negara, mendefinisikan misinya terutama dalam hal membangun teori kebijakan luar negeri, bukan dalam pembangunan teori sistem dimana negara berinteraksi. Meskipun demikian, neo-realisme mementingkan metodologi dengan asumsi fundamentalnya bahwa sistem internasional berperan dalam menyusun dan membatasi pilihan kebijakan negara.<sup>60</sup>

Menurut Oxford English Dictionary, *inaction* berarti kurangnya tindakan dimana diharapkan atau patut dilakukan,<sup>61</sup> dan menurut Cambridge Dictionary, *inaction* berarti kegagalan dalam melakukan apapun yang memungkinkan agar

---

<sup>59</sup> Valerie M. Hudson, *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory* (New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2007), 143.

<sup>60</sup> Steven E. Lobell, Norrin M. Ripsman, Jeffrey W. Taliaferro, *Neo-classical Realism, the State, and Foreign Policy* (Cambridge University Press, May 14, 2014), hal. 19

<sup>61</sup> Oxford Dictionaries, *inaction* | Definition of *inaction* in English by Oxford Dictionaries, October 25, 2016 <https://en.oxforddictionaries.com/definition/inaction>

dapat memberikan solusi untuk suatu masalah.<sup>62</sup> Dalam tulisannya yang berjudul “From International Relations to Global Society,” Michael Barnett dan Kathryn Sikkink mengatakan bahwa dari gambaran Max Weber dan ahli teori sosiologi klasik lainnya tentang bagaimana aktor memberi makna yang signifikan terhadap tindakan dan pemahaman intersubjektif adalah salah satu cara untuk mengidentifikasi pola *action* dan *inaction*. Hal ini akan memberikan pancingan ketertarikan aktor terhadap *conditions of possibility* diartikan sebagai apa yang memungkinkan tindakan tertentu, apa alternatif yang dilihat secara benar tanpa adanya refleksi atau diskusi, dan pandangan alternatif yang tidak terpikirkan.<sup>63</sup>

Dalam batas wilayah politik-administratif yang disebut negara, ada peraturan, tujuan, kerangka hukum, dan sistem administrasi, serta dengan peran administrasi, terdapat kemungkinan untuk menganggap tanggung jawab dalam melakukan tindakan ataupun tidak bertindak. Masalah di dalam Hubungan Internasional adalah untuk mendapatkan semacam kesepakatan yang disepakati tentang keadaan *stance* suatu negara, apa tujuan mereka, dan diposisi manakah sistem negara aturan yang dijalankan. Karakterisasi negara adalah isu mendasar bagi sebuah negara agar dapat dimintai pertanggungjawabannya yang berkaitan dengan *state action* dan *inaction* di setiap isu-isu yang terlibat.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Cambridge Dictionaries, *inaction* Meaning in the Cambridge English Dictionary, 2017, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/inaction>

<sup>63</sup> M. N. Barnett and K. Sikkink, *From International Relations to Global Society* (Oxford, Oxford University Press, September 2013) hal 13  
<http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199604456.001.0001/oxfordhb-9780199604456-e-035?print=pdf>

<sup>64</sup> Ian Forbes, Mark Hoffman, *Political Theory, International Relations, and the Ethics of Intervention* (Southampton: Palgrave Macmillan UK, Aug 24, 1993), Hal 59

## 1.6. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

### 1.6.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu mencoba menggambarkan suatu fenomena melalui data-data yang terkumpul dan menjelaskan apa yang terjadi, pola atau struktur fenomena tersebut serta hubungan antar fakta.<sup>65</sup> Adapun metode analisis akan dilakukan dengan mengkombinasikan data dengan teori-teori yang ada. Mekanisme ini akan mengikuti kaidah *compiling*, *disassembling* and *reassembling* sebagaimana yang disampaikan Robert K. Yin. Dimana *compiling* data merupakan proses menyusun data ke dalam format asli. Selanjutnya, *disassembling* data yaitu proses mencari konstruksi yang tepat dari semua data yang terkumpul, dimana ini dilakukan bila diperlukan. Sedangkan *reassembling*, adalah posisi dimana penulis sudah menemukan pola dari data yang dimiliki.<sup>66</sup> Dalam posisi ketiga ini, penulis akan menggunakan teori-teori yang relevan untuk membantu upaya analisis sehingga tercapai kesimpulan.

### 1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data akan didapatkan dari situs-situs internet dengan informasi terbaru, jurnal dari berbagai pakar mengenai masalah yang diangkat, dan buku-buku yang memiliki relevansi dengan topik. Penggunaan data-data primer dan

---

<sup>65</sup>J.W. Creswell, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, (United States: SAGE Publications, Inc., 1994), 9.

<sup>66</sup>Robert K. Yin, *Qualitative Research from start to finish*, (New York-London: The Luilford Press, 2011),176.

sekunder juga akan digunakan sebagai sumber pendukung pelaksanaan penelitian. Data-data primer merupakan dokumen-dokumen yang langsung didapat dari pihak resmi terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini seperti dari United Nations (UN), Association of South East Asian Nation (ASEAN), dan lain-lain. Sedangkan metode pengumpulan data sekunder adalah dengan penelusuran literatur melalui studi kepustakaan (buku, skripsi, tesis, dan jurnal ilmiah), media cetak (koran, majalah, jurnal, artikel, dan laporan), dan media elektronik (internet).

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Penulisan ini akan dibagi ke dalam lima bab. Bab I, sebagai awal dan dasar penulisan. Penulis akan memaparkan latar belakang masalah penelitian ini yang diangkat berdasarkan kajian teori yang berhubungan dengan hal tersebut serta mengidentifikasi dasar penelitian yang akan mengacu pada bab-bab selanjutnya kemudian mencantumkan pula deskripsi tujuan, kegunaan, pembatasan masalah, metode, sistematika penulisan serta kajian literatur yang membantu analisis dalam penelitian ini.

Pada bagian selanjutnya yaitu BAB II, penulis akan memaparkan data yang menunjang analisis, mendeskripsikan secara komprehensif mengenai ekspansi Cina di wilayah sengketa Laut Cina Selatan dan bagaimana hubungannya dengan hukum internasional. Ekspansi tersebut dibagi menjadi dinamika yang membahas peristiwa-peristiwa krusial antar negara, kemudian hubungan yang terjadi di antara fenomena tersebut dan dampaknya terhadap negara-negara anggota ASEAN.

Substansi dari Bab II kemudian akan menjadi pembahasan analisis mengenai pembentukan hubungan yang didasari oleh sengketa.

Sedangkan Bab III akan mendeskripsikan kepentingan nasional dan program atau kebijakan Amerika Serikat dari awal tahun 2012 hingga akhir tahun 2016, terutama yang berhubungan dan ditujukan dalam menanggapi sengketa. Selain itu penulis akan membahas keterkaitan kebijakan dengan kesesuaian kepentingan nasional dan bagaimana sengketa Laut Cina Selatan tidak memengaruhi perubahan kebijakan tersebut, walaupun Amerika Serikat adalah negara *superpower*.

Bab IV merupakan bagian analisa yang akan menjawab pertanyaan penelitian dengan menganalisa pembentukan pendirian, dimana sisi yang diambil oleh Amerika Serikat yang memiliki keterkaitan dengan kepentingannya dengan tidak mendominasi kekuatan di Asia. Lalu penulis juga akan membahas mengenai factor pendukung alasan dan tujuan *inaction* AS, termasuk hubungannya dengan penggolongan kepentingan nasional negaranya terhadap isu nuklir yang menjadi salah satu faktor besar terhadap *inaction* di sengketa Laut Cina Selatan. Hal ini memiliki keterkaitan prioritas kepentingan terhadap sengketa Laut Cina Selatan dalam lingkup kepentingan untuk isu yang lebih dipertimbangkan.

Pada bagian akhir dari penelitian ini, yaitu Bab V, merupakan kesimpulan masalah, penegasan jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan dalam Bab I, serta juga sebagai penutup dalam penelitian, yaitu akan disimpulkan mengenai alasan *inaction* Amerika Serikat di sengketa Laut Cina Selatan pada masa pemerintahan kepresidenan Barrack Obama tahun 2008-2016.